



Analisis Kontribusi PAD, Kemiskinan dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Riau

Analysis of the Contribution of Local Own-Source Revenue, Poverty, and Fiscal Independence to Economic Growth in the Riau Islands

Lorensia Kristina Br Siregar^{1*}, Erika Krissanta², Muhammad Rizki Firdaus³, Myrna Sofia⁴

^{1,2,3}Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email: *lorensia.kristina@kemenkeu.go.id

Article Info

Article history:

Received: 9 Juli 2025

Accepted: 2 Januari 2025

Published: 6 Februari 2026

Keywords: *local own-source revenue; economic growth; regional fiscal independence; poverty rate; riau island*

DOI:10.37859/jae.v15i2.9662

JEL Classification: H71; H72

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemiskinan, dan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Data panel tujuh kabupaten/kota selama periode 2017–2023 dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat kemiskinan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, mencerminkan hubungan yang kompleks antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kemandirian fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan PAD dan pengentasan kemiskinan, serta perlunya peningkatan kemandirian fiskal untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah.

This study analyzes the effects of Regional Original Revenue (PAD), poverty levels, and fiscal independence on economic growth in the Riau Islands Province. Panel data from seven regencies/cities covering the period 2017–2023 were analyzed using panel data regression. The results indicate that PAD has a positive and significant effect on economic growth, while poverty levels also show a positive and significant effect, reflecting the complex relationship between poverty and economic growth. Fiscal independence has a positive but statistically insignificant effect. These findings highlight the importance of strengthening PAD and poverty alleviation, as well as the need to enhance fiscal independence to support regional economic resilience.

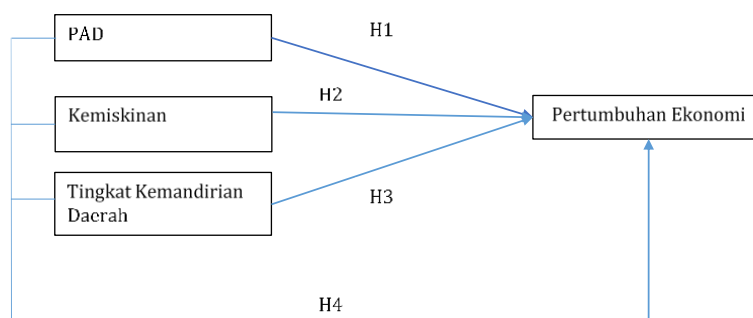
PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi PAD, maka kapasitas daerah akan semakin dalam membiayai kebutuhannya tanpa bergantung pada dana perimbangan dari pusat (Saragih, 2022). Namun, di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), meskipun PAD mengalami pertumbuhan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi kendala dalam mencapai pembangunan yang inklusif (BPS Kepri, 2023; todaro et al., 2022).

Kepri sebagai provinsi kepulauan memiliki tujuh kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan sosiokultural yang berbeda-beda, yang menyebabkan variasi dalam perkembangan ekonomi di tiap wilayah (BPS, 2023). Salah satu permasalahan utama adalah disparitas pendapatan, di mana kota Batam dan Tanjung Pinang sebagai pusat industri dan perdagangan memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Natuna, Anambas, dan Lingga yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan tradisional (Bank Indonesia, 2023; Widodo & Setiawan, 2023).

Daerah dengan kemandirian fiskal rendah sering kali memiliki alokasi belanja yang kurang produktif, sehingga dampak PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang signifikan (DJPB Kemenkeu, 2023; Rahmat & Nurdin, 2023). Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan pada beberapa wilayah di Kepri turut menghambat peningkatan PAD, karena rendahnya daya beli masyarakat berimplikasi pada melemahnya pendapatan pajak daerah (World Bank, 2023; Widodo & Setiawan, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: (1) PAD diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, (2) Tingkat Kemiskinan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri dan (3) Tingkat Kemandirian Daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, (4) PAD, Kemiskinan dan Tingkat kemandirian daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri.

PAD merupakan salah satu indikator penting dalam memahami kondisi perekonomian di Daerah. Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth*) sendiri merupakan perkembangan aktivitas ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa oleh masyarakat sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2022) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkelanjutan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin semakin besar.

Boediono (1999) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita jangka panjang, yang menekankan dimensi perubahan indikator pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu yang cukup Panjang. Nilai output umumnya diukur menggunakan indikator moneter, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sementara itu, menurut Rostow (1971), suatu masyarakat yang telah mencapai tahap pertumbuhan berkelanjutan dapat dikategorikan berada pada fase prasyarat untuk lepas landas, yakni ketika proses pertumbuhan ekonomi mulai terjadi secara lebih konsisten.

Menurut Halim (2004:94), PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber atas potensi wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber PAD meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peningkatan PAD berpotensi meningkatkan kapasitas belanja daerah yang berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik (Susanti & Widodo, 2022). Namun demikian, ketidakefisienan dalam pengelolaan PAD dapat mengurangi dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama apabila PAD tidak digunakan secara produktif (Rahmat & Nurdin, 2023; Setiawan, 2022).

Sejumlah penelitian telah menelaah hubungan PAD dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Studi oleh Supit Watulingas et al. (2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian pula, penelitian oleh Sunarya Sulaeman dan Silvia (2019) menunjukkan bahwa PAD memiliki efek positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah memperluas kapasitas pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, peningkatan PAD yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat mengindikasikan adanya penarikan pendapatan dari masyarakat tanpa peningkatan produktivitas yang sepadan.

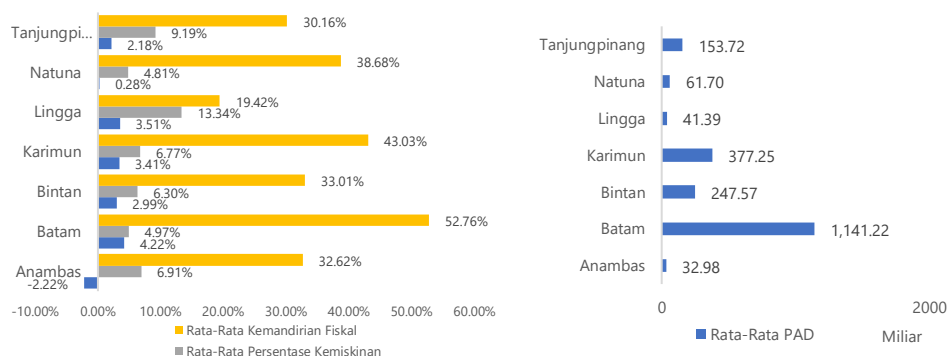
Todaro dan Smith (2022) menjelaskan bahwa kemiskinan daerah terjadi ketika sebagian besar penduduk hidup di bawah standar kehidupan yang layak, ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita dan keterbatasan kesempatan kerja, yang berdampak pada mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan, sementara *World Bank* (2023) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar akibat berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi karena menurunkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi potensi penerimaan pajak daerah (*World Bank*, 2023). Di Kepri, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Natuna dan Lingga memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dan akses ekonomi, yang berdampak pada rendahnya kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS Kepri, 2023; Firdaus & Kurniawan, 2023).

Kemandirian fiskal daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah membiayai belanja dan pembangunan menggunakan pendapatan lokal tanpa ketergantungan berlebih pada transfer dari pemerintah pusat. Indikator kemandirian fiskal biasanya diukur melalui perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah, yang mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskalnya (Saragih, 2022; Widodo & Setiawan, 2023). Selanjutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) memperlihatkan bahwa daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, karena mereka memiliki fleksibilitas untuk

mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas pembangunan secara optimal. Semakin tinggi kemandirian fiskal, semakin besar peran PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketergantungan yang kuat pada transfer pusat sering kali berimplikasi pada rendahnya efektivitas belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (DJPB Kemenkeu, 2023; Rahayu, 2022).

Grafik 1. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Persentase Kemiskinan, dan Kemandirian Fiskal Kab/Kota Lingkup Kepri 2017-2023



Sebagaimana pada grafik 1, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara rata-rata terdapat pada Kota Batam yang mencapai 4,22%. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah secara rata-rata terdapat pada Kabupaten Anambas dengan pertumbuhan minus mencapai -2,22%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Daerah dengan tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kota Batam dengan persentase penduduk miskin sebanyak 4,97% dari total penduduk. Sedangkan daerah persentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada Kabupaten Lingga yang mencapai 13,34% dari total penduduk. Kemudian pada periode ini, kemandirian fiskal tertinggi terdapat pada Kota Batam dengan angka mencapai 52,76%. Adapun daerah dengan kemandirian fiskal terendah terdapat pada Kabupaten Lingga yang hanya sebesar 19,42%. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan fiskal yang masih cukup tinggi pada beberapa daerah di Kepri terhadap dana TKD dari pusat.

Dari sisi PAD, daerah dengan PAD tertinggi terdapat pada Kota Batam yang mencapai Rp1.141,22 miliar. Sedangkan daerah dengan PAD terendah terdapat pada Kabupaten Lingga Rp41,39 miliar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh Kota Batam sebagai daerah pusat industri yang menjadi peluang besar bagi pengelola fiskal daerah. Adapun daerah lainnya, seperti Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Anambas masih terdapat keterbatasan potensi objek pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan kondisi yang cukup bervariasi tersebut, penting untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi di Kepri. Sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis 1) pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) pengaruh persentase kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi; dan 3) pengaruh kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Data pada penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepri Tahun 2017-2023 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (kepri.bps.go.id) yang dikumpulkan dari tahun 2017-2023. Penelitian menggunakan analisis kuantitatif, yakni suatu metodologi yang bersifat positif dengan menggunakan populasi dan sampel tertentu. Data yang digunakan dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian serta

melakukan analisis secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2017: 8).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan daerah kabupaten dan kota lingkup Provinsi Kepri sebanyak 7 kabupaten/kota periode 2017-2023 dengan observasi sebanyak 49. Sugiyono (2020:127) mengatakan bahwa sampel merupakan representasi populasi dalam suatu penelitian baik dari ukuran maupun karakteristik.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu perpaduan antara data *time series* dan *cross section*. Menurut Ghazali (2017:195) ada tiga model yang akan digunakan untuk melakukan analisis yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*.

Common Effect Model merupakan suatu model dalam menganalisis data panel yang memadupadankan antara data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil dan juga dapat menggunakan metode *pooled least square*.

Persamaan Common Effect Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen

i = Cross Section

t = Time Series

e = Error

Fixed Effect Model merupakan suatu model analisis data panel mencakup efek yang berbeda antar suatu individu dengan individu lain dan merupakan parameter yang tidak dapat diobservasi dan dapat diestimasi menggunakan teknik *least square dummy*.

Persamaan untuk Fixed Effect Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen

i = Cross Section

t = Time Series

e : Error

Random Effect Model merupakan model untuk menganalisis data panel dan mampu mengurangi penggunaan derajat kebebasan, sehingga estimasi menjadi lebih efisien. Dalam *Random Effect Model*, pendugaan parameter menggunakan metode *generalized least square*.

Persamaan untuk Random Effect Model adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_n X_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen

i = Cross Section

t = Time Series

e : Error

Untuk memilih model mana yang akan digunakan maka dilakukan beberapa pengujian. Pertama yaitu Uji Chow yang bertujuan untuk menentukan pemilihan antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Uji Chow menggunakan hipotesis jika nilai chi-square cross section < 0,05, maka Fixed Effect Model menjadi pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika nilai chi-square cross section > 0,05, maka Common Effect Model dipilih.

Kedua yaitu Uji Hausman digunakan untuk menentukan model mana yang lebih sesuai antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hipotesis yang digunakan jika nilai cross section random < 0,05, maka *Fixed Effect Model* dipilih sebagai model yang tepat. Sebaliknya, jika nilai cross section random > 0,05, maka Random Effect Model dipilih (Rosinta, 2018). Adapun dalam kasus ini, uji Hausman tidak diperlukan.

Ketiga yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model yang lebih cocok antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* dalam analisis data panel. Apabila nilai LM lebih besar daripada nilai Chi-Square, maka model yang sesuai adalah Random Effect Model. Sebaliknya, jika nilai LM lebih kecil daripada nilai Chi-Square, maka model yang sesuai adalah Common Effect Model.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menilai adanya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi, di mana nilai koefisien korelasi yang melebihi 10 mengindikasikan adanya multikolinearitas, sedangkan nilai di bawah 10 menunjukkan model bebas dari masalah tersebut. Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan ketentuan bahwa nilai F hitung > F tabel menunjukkan adanya pengaruh signifikan, sedangkan F hitung < F tabel menunjukkan sebaliknya. Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, di mana Ho ditolak apabila nilai t hitung > t tabel dan tingkat signifikansi < 0,05, yang menunjukkan pengaruh signifikan (Ghozali, 2016:97). Selain itu, uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai R² berada pada rentang 0 hingga 1; semakin besar nilai R², semakin besar pula proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis menggunakan metode regresi data panel dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh PAD, Tingkat Kemiskinan dan TKFD terhadap pertumbuhan ekonomi pada tujuh kabupaten/kota di Kepri. Untuk memiliki model estimasi dilakukan melalui tahapan Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil masing-masing pengujian sebagaimana pada tabel 4.1, tabel 4.2, dan tabel 4.3.

Table 4.1: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.137285	(6,39)	0.3593
Cross-section Chi-square	7.900761	6	0.2455

Table 4.2: Hasil Uji Hausman.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.262614	3	0.3529

Table 4.3: Hasil Uji Lagrange Multiplier.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.636872 (0.4248)	54.71514 (0.0000)	55.35201 (0.0000)
Honda	-0.798043 (0.7876)	7.396968 (0.0000)	4.666145 (0.0000)
King-Wu	-0.798043 (0.7876)	7.396968 (0.0000)	4.666145 (0.0000)
Standardized Honda	0.089733 (0.4642)	7.896120 (0.0000)	3.103929 (0.0010)
Standardized King-Wu	0.089733 (0.4642)	7.896120 (0.0000)	3.103929 (0.0010)
Gourieroux, et al.	--	--	54.71514 (0.0000)

Berdasarkan ketiga uji tersebut, model yang terpilih untuk digunakan dalam analisis ini adalah REM. Pemilihan model ini sebagaimana hasil Uji Hausman yang menunjukkan $pvalue > 0,05$, yang mengindikasikan REM lebih tepat dibandingkan FEM. Selain itu, hasil Uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai statistik nilai Breusch-Pagan $< 0,05$, yang menguatkan bahwa REM lebih unggul dibandingkan CEM. Dengan mempertimbangkan hasil kedua uji tersebut, model REM dipilih untuk mengestimasi pengaruh PAD, TKFD, serta tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Hasil estimasi menggunakan model REM sebagaimana pada tabel 4.4.

Dependent Variable: PDRB2
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/17/25 Time: 22:12
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 49
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_PAD	0.015783	0.005748	2.746004	0.0086
PERSENTASE_KEMISKINAN	0.581855	0.250685	2.321065	0.0249
KEMANDIRIAN_2_INCDBH	0.047027	0.085119	0.552482	0.5834
C	-0.445045	0.130945	-3.398712	0.0014

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.004721	0.0228
Idiosyncratic random		0.030898	0.9772

Weighted Statistics			
R-squared	0.279730	Mean dependent var	0.019045
Adjusted R-squared	0.231712	S.D. dependent var	0.035353
S.E. of regression	0.030988	Sum squared resid	0.043211
F-statistic	5.825511	Durbin-Watson stat	2.010796
Prob(F-statistic)	0.001883		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.305940	Mean dependent var	0.020543
Sum squared resid	0.043752	Durbin-Watson stat	1.985954

Table 4.4: Hasil Uji Random Effect Model (REM).

Hasil estimasi model REM menunjukkan bahwa variabel PAD memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, ditunjukkan oleh $p-value$ sebesar 0,0086 ($< 0,05$). Menariknya, persentase kemiskinan juga memperlihatkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($p-value = 0,0249 < 0,05$), meskipun secara teori hubungan ini umumnya bersifat negatif. Di sisi lain, tingkat kemandirian fiskal tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan secara statistik ($p-value =$

0,5834). Nilai konstanta model terbukti signifikan, mengindikasikan adanya faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara simultan.

Hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien sebesar 0,01578 dan nilai probabilitas 0,0086 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD memiliki kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan output ekonomi regional. Penemuan ini sejalan dengan teori fiskal desentralisasi yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menyatakan bahwa ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan fiskal yang lebih besar dan mampu mengumpulkan pendapatan secara mandiri, maka efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya publik cenderung meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian studi oleh Smoke (2015) dan Ginting et al. (2019) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki basis PAD yang kuat lebih fleksibel untuk membiayai pembangunan daerah tanpa ketergantungan yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini secara nyata terlihat di Provinsi Kepulauan Riau, di mana wilayah-wilayah seperti Batam dan Bintan memperoleh PAD yang tinggi dari sektor industri, jasa, dan perdagangan internasional.

Namun demikian, meskipun PAD berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, potensi terjadinya disparitas antar wilayah perlu menjadi perhatian. Peningkatan PAD cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi dominan, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal horizontal dan ketidakmerataan hasil pembangunan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi (Prud'homme, 1995). Di Kepri sendiri perbedaan kapasitas fiskal antara Batam dan wilayah seperti Lingga atau Natuna menciptakan kesenjangan dalam kemampuan penyediaan layanan publik dan peluang ekonomi yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, peningkatan PAD harus diiringi dengan strategi distribusi pembangunan yang lebih inklusif. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan alokasi PAD untuk investasi produktif di wilayah tertinggal, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM lokal, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, PAD tidak hanya menjadi penopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga instrumen untuk mendorong keadilan ekonomi antar wilayah dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat daerah.

Kemudian hasil regresi juga menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun temuan ini tidak serta-merta memberikan arti bahwa kemiskinan mendorong pertumbuhan secara langsung, melainkan mengindikasikan bahwa dalam konteks tertentu, pertumbuhan dapat terjadi tanpa disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan Indrawati *et al.* (2021) dan Safitri & Priyarsono (2015), yang menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia, pertumbuhan ekonomi justru meningkat bersamaan dengan tetap tingginya tingkat kemiskinan.

Fenomena ini mencerminkan pola pertumbuhan yang tidak inklusif, di mana manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah tingginya ketimpangan distribusi pendapatan (Rasio Gini), yang sayangnya tidak dapat dimasukkan ke dalam model karena keterbatasan data yang konsisten antar daerah dan tahun. Oleh karena itu, temuan ini harus dibaca dengan hati-hati dan menjadi catatan untuk studi lanjutan yang dapat memasukkan variabel ketimpangan secara eksplisit.

Hasil penelitian ini menjadi semakin relevan karena struktur ekonomi di Kepri yang terpusat di kota-kota industri seperti Kota Batam, dengan dominasi pada sektor ekspor dan

industri pengolahan yang menyumbang pertumbuhan ekonomi secara signifikan, namun tidak secara langsung menyentuh kelompok masyarakat berpendapatan rendah di daerah-daerah *hinterland*. Akibatnya, meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi, tingkat kemiskinan tetap bertahan relatif tinggi di sejumlah kabupaten/kota. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa koefisien positif kemiskinan dalam model mencerminkan ketimpangan spasial maupun sosial yang belum terakomodasi dalam model kuantitatif. Dengan demikian, temuan ini menjadi peringatan penting bagi perumus kebijakan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis wilayah dan perluasan akses lapangan kerja produktif bagi masyarakat rentan.

Jika dilihat secara simultan, variabel PAD, persentase kemiskinan, dan tingkat kemandirian fiskal secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *F-statistic* sebesar 5,825 dengan tingkat signifikansi $p = 0,0018$, yang berada di bawah ambang batas 5%. Dengan demikian, ketiga variabel independen dalam model memiliki pengaruh simultan terhadap variabel dependen secara statistik.

Nilai R-squared sebesar 0,2797 menunjukkan bahwa sekitar 27,97% variasi dalam pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2017–2023 dapat dijelaskan melalui tiga variabel tersebut. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,2317 memperlihatkan tingkat penyesuaian atas jumlah variabel independen dalam model. Meskipun tergolong moderat, nilai R-squared ini sejalan dengan karakteristik data panel makroekonomi daerah yang cenderung memiliki variabilitas tinggi dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, termasuk dinamika kebijakan pusat, perubahan teknologi, serta kondisi global.

Secara teoritik, hasil ini memperkuat argumen dalam teori desentralisasi fiskal sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1972) dan diperkuat oleh Smoke (2015), yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal dan sosial daerah merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi studi-studi sebelumnya, seperti oleh Lewis (2003) dan McCulloch dan Sjahrir (2008), yang menekankan pentingnya pengelolaan PAD dan kebijakan fiskal daerah yang efisien serta inklusif.

SIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencerminkan hubungan timbal balik antara peningkatan aktivitas ekonomi dan peningkatan penerimaan daerah, di mana PAD juga berperan sebagai sumber belanja pemerintah yang secara tidak langsung mendorong perekonomian wilayah. Tingkat kemiskinan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri banyak didorong oleh investasi nasional dan multinasional yang belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di wilayah nonindustri. Sementara itu, kemandirian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan masih dominannya sumber PAD yang kurang produktif serta adanya ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan oleh variabel PAD, tingkat kemiskinan, dan kemandirian fiskal.

SARAN

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan langkah strategis yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penguatan PAD perlu dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan menyoar sektor-sektor produktif, khususnya di kawasan industri, guna mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional seperti Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB, dan BBNKB. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif memerlukan sinergi lintas sektor melalui penguatan pemberdayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta optimalisasi tenaga kerja lokal melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Peningkatan kemandirian fiskal juga perlu didukung dengan alokasi belanja PAD yang lebih strategis pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari sisi variabel dan metode analisis, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel moderasi seperti belanja daerah dan rasio gini serta menggunakan pendekatan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau menurut Lapangan Usaha 2018–2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indikator Kemandirian Fiskal Daerah dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Indikator Kemiskinan dan Pengeluaran Penduduk*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. (2023). *Laporan Statistik Ekonomi Kepri 2023*. Tanjungpinang: BPS Kepri.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boediono. (1999). *Ekonomi makro*. Yogyakarta: BPFE.
- DJPB Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan Kinerja Transfer Keuangan ke Daerah*. Jakarta: DJPB Kementerian Keuangan.
- Firdaus, M., & Kurniawan, R. (2023). Ekonomi regional dan ketimpangan pembangunan. *Jurnal Ekonomi Makro*, 19(2), 78–90.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destianingsih, R. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Papua tahun 2014–2019. *Directory Journal of Economic*, 2(4), 1068–1080.
- Kurniawan, A. (2021). Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(2), 45–58.
- Oates, W.E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Prud'homme, R. (1995). *The dangers of decentralization*. World Bank Research Observer
- Rahmat, F., & Nurdin, H. (2023). Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Makro*, 21(1), 89–102.

- Rahayu, D. (2022). Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Rostow, W. W. (1971). *The stages of economic growth: A non-communist manifesto* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Safitri, R. I. dan D.S. Priyarsono. (2015). *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan: Analisis Data Provinsi Di Indonesia 2010-2013*
- Saragih, B. (2022). Analisis kemandirian fiskal dan implikasinya terhadap pertumbuhan daerah. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Sen, A. (2023). *Development as freedom*. New York: Oxford University Press.
- Setiawan, A. (2022). Dinamika PAD dan pertumbuhan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Publik*, 20(3), 99–112.
- Smoke, P. (2015). *Public Financial Management in Decentralised and Decentralising Environments*. GSDRC Professional Development Reading Pack no. 20. Birmingham, UK: University of Birmingham.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sunarya Sulaeman, A., & Silvia, V. (2019). Pendapatan asli daerah, transfer daerah, dan belanja modal, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 97–110.
- Supriyadi, R., Adi, H., & Lestari, W. (2022). *Tantangan fiskal daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supit Watulingas, C. A., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 104–115.
- Susanti, R., & Widodo, S. (2022). Analisis efektivitas belanja daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 18(2), 134–148.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2022). *Economic development* (13th ed.). Boston: Pearson.
- Widodo, S., & Setiawan, B. (2023). Efektivitas kebijakan fiskal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(3), 112–130.
- World Bank. (2023). *Poverty and economic growth in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Kepri Tahun 2017–2023, Laporan KFR dan GFS Kanwil DJPb Kepri*.